

KONFLIK CHINA-TAIWAN DAN RESPONS AMERIKA SERIKAT

7

Sita Hidriyah

Abstrak

Ketegangan China-Taiwan yang meningkat akhir-akhir ini telah menyita perhatian media. Ketegangan tersebut ditandai oleh aktivitas militer China yang meningkat di wilayah udara Taiwan, yang disebut China sebagai langkah melindungi perdamaian dan stabilitas. Sebaliknya, pihak Taiwan menentang aksi China tersebut yang dianggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Tulisan ini mengkaji ketegangan yang terjadi dalam hubungan China dan Taiwan, serta respons Amerika Serikat (AS) terhadap hal tersebut. Hasil kajian mengungkapkan, konflik China-Taiwan bisa saja dilihat sebagai persoalan internal bagi China. Namun, kehadiran Taiwan sebagai entitas yang cukup penting di kawasan telah mengundang AS, yang juga memiliki kepentingan dengan Taiwan dan juga kawasan, untuk menaruh perhatian pada persoalan yang terjadi di Taiwan, termasuk dalam hubungan China-Taiwan. Kehadiran AS di sini sudah tentu dalam kerangka rivalitasnya dengan China di kawasan. Bagi negara-negara di kawasan yang terpenting adalah, situasi yang memanas dalam hubungan China-Taiwan tidak berkembang ke arah konflik terbuka, karena dampaknya bisa mengancam keamanan kawasan.

Pendahuluan

Konflik China-Taiwan kembali memanas pada awal bulan Oktober 2021 setelah sejumlah pesawat tempur China memasuki wilayah udara Taiwan (Kompas.com., 5 Oktober 2021). Menyikapi langkah agresif militer China ke wilayahnya, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan apa pun untuk mempertahankan diri. Ketegangan yang mewarnai hubungan China dan Taiwan, sudah tentu, tidak terlepas dari sikap China yang

secara resmi menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dari wilayahnya, sehingga perlu diupayakan kembali menjadi bagian dari wilayah China.

Namun, yang juga menarik dari perkembangan situasi di Selat Taiwan ini adalah meningkatnya aktivitas militer China di wilayah itu setelah pakta trilateral AUKUS yang melibatkan Australia, Inggris dan AS terbentuk pada 15 September 2021. Spekulasi pun muncul, bahwa agresivitas China di Selat Taiwan adalah untuk menegaskan



penentangan China terhadap kehadiran AUKUS dan sekaligus penegasan China bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya yang tidak dapat diganggu gugat. Menjadi menarik kemudian untuk dibahas dalam tulisan ini, bagaimana sesungguhnya hubungan antara China dan Taiwan serta latar belakang meningkatnya ketegangan di antara mereka, dan bagaimana AS, sebagai rival utama China di kawasan, meresponsnya.

Taiwan, Potensi dan Hubungannya dengan China

Terlebih dahulu perlu dikemukakan dalam tulisan ini bahwa China dan Taiwan memiliki hubungan ekonomi yang erat. Keduanya, yang berada di kawasan Asia Pasifik, menjadi bagian dari pendorong berkembangnya kegiatan sektor ekonomi di kawasan, khususnya industri dan perdagangan. Sebagaimana diketahui, prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang di Asia Pasifik dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni demografi, pertumbuhan produktivitas, dan kebangkitan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan perekonomian global yang semakin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, dampak dari ketegangan yang terjadi di Selat Taiwan, tentunya sudah diantisipasi oleh Taiwan maupun China. Konflik ini tidak semata terkait dengan masalah teritorial belaka, ataupun persoalan sosial budaya, tetapi lebih daripada itu, banyak aspek yang perlu digali dan dipelajari lebih dalam. Faktor kekuatan ekonomi negara maju, digitalisasi ekonomi, pengaruh dalam pengambilan

kebijakan beberapa negara Asia Pasifik, dalam hal ini Taiwan dan China juga termasuk di dalamnya.

Sebagai contoh, dibalik konfrontasi dan ketegangan militer di antara keduanya, terjalin hubungan yang cukup baik di antara China dan Taiwan. Tahun 2020, misalnya, China menerima sekitar 44% dari total ekspor yang dilakukan oleh Taiwan. Angka ini meningkat kurang lebih 12% dari tahun sebelumnya. Sebuah angka yang cukup mengejutkan, karena hampir setengah dari total ekspor Taiwan, pembelinya adalah China. Taiwan mendominasi pasar Semiconductor Foundry Market dan bersama-sama produsen kontraknya, menurut data riset TrendForce yang berbasis di Taiwan, menyumbang lebih dari 60% dari total pendapatan perusahaan Taiwan yang bergerak di bidang pengecoran logam tahun lalu. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co atau TSMC adalah perusahaan pengecoran logam terbesar di dunia yang menjadikan perusahaan teknologi besar seperti Apple, Qualcomm, dan Nvidia sebagai kliennya (CNBC, 15 Maret 2021).

Hubungan yang kompleks tidak hanya terjadi pada Taiwan dan China, tapi juga AS. Dalam UU Relasi Taiwan 1979 (*Taiwan Relations Act 1979*), yang disahkan beberapa bulan setelah normalisasi AS-China empat dekade silam, dijelaskan bahwa AS tidak boleh terlibat dalam konflik militer Taiwan. Uniknya, AS boleh menawarkan alat atau teknologi persenjataan kepada Taiwan agar mereka bisa membela diri apabila suatu hari nanti diserang. Dilansir dari Bloomberg, pemerintah AS menjual senjata

senilai lebih Rp300 triliun kepada Taiwan sejak 2010 (Media Indonesia, 23 Oktober 2021).

Sampai saat ini, Taiwan diakui secara *de facto* (sementara) oleh 23 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Afrika, Amerika Selatan, serta Pemerintah Vatikan di Roma. Pengakuan itu tidak terlepas dari keberadaan Taiwan sebagai kekuatan ekonomi Asia yang cukup penting dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Fakta lainnya, Taiwan juga tetap melakukan kerja sama dagang dan ekonomi dengan beberapa negara di Uni Eropa dan Asia-Pasifik, yang tanpa menuntut pengakuan diplomatik resmi dari mereka, sekalipun China membuat kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Taiwan dan memaksa mereka mencabut dukungan terhadap Taiwan.

Ketegangan China-Taiwan

China dan Taiwan saat ini dinilai sedang mengalami ketegangan terburuk dalam waktu 40 tahun terakhir. Konflik yang berkepanjangan ini, berawal dari runtuhnya pemerintahan Republik Tiongkok di daratan China (1912–1949) yang dimulai dengan kejadian perang saudara antara Republik Tiongkok yang berhaluan nasionalis dengan Partai Komunis Tiongkok, dan diakhiri dengan gencatan pertempuran militer besar, dengan hasil Partai Komunis Tiongkok menguasai China daratan, sedangkan yurisdiksi Republik Tiongkok (Taiwan) berkuasa di beberapa pulau yang sekarang disebut sebagai

Taiwan.

Konflik yang terjadi belakangan ini menjadi ketegangan terburuk di tengah upaya Presiden Tsai Ing-wen yang terus mencari dukungan pengakuan internasional bagi kemerdekaan Taiwan. Sebaliknya, bagi China, Taiwan adalah bagian dari negaranya yang mencoba untuk memberontak dan melepaskan diri. Tidak mengherankan jika kemudian China beberapa kali memberikan peringatan secara lisan ataupun melakukan tindakan provokasi secara militer di wilayah udara Taiwan. Xi Jinping, presiden China, bahkan menegaskan bahwa China tidak akan ragu untuk memulai peperangan demi mempertahankan Taiwan.

China, dengan kekuatan militernya, diperkirakan akan dengan mudah menguasai Taiwan. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan hal lainnya oleh China ketika merencanakan akan melakukan agresi militer ke Taiwan. Hal tersebut adalah kehadiran AS, yang bisa dipastikan tidak akan tinggal diam jika agresi militer China ke Taiwan benar-benar terjadi. Keberadaan *Taiwan Relations Act* 1979 memberi ruang bagi AS untuk membantu Taiwan jika terjadi konflik terbuka. Guna menyikapi intimidasi dari China, Taiwan juga meminta bantuan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan intelijen mengingat provokasi dan konfrontasi China semakin intens dan meluas.

Jika agresi militer China ke Taiwan terjadi, dan melibatkan AS, maka hal tersebut berpotensi mengancam perekonomian China yang sedang menanjak dan juga bisa berdampak pada perekonomian

global. Mengingat China dan AS adalah bagian dari kekuatan ekonomi global, di mana berbagai kebijakan ekonominya sangat menentukan dan memiliki pengaruh bagi kelangsungan perekonomian internasional.

Respons AS terhadap Konflik China-Taiwan

Konflik yang terjadi antara China dan Taiwan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga menjadi perhatian AS. Dalam wawancara dengan media Agustus lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan membantu dan mempertahankan kepentingan sekutu-sekutunya, tidak saja negara-negara anggota NATO di Eropa, tetapi juga sekutu-sekutunya di Asia Pasifik, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Khusus Taiwan, juru bicara Gedung Putih menegaskan bahwa dukungan AS kepada Taiwan tidak berubah (Media Indonesia, 23 Oktober 2021). Jika menelisik sedikit mundur ke tahun 2020, ketika AS masih dipimpin oleh Presiden Donald Trump, AS menyetujui proyek penjualan senjata ke Taiwan dengan nilai USD5,1 miliar, atau sekitar RP76,5 triliun, dan kebijakan ini akan terus dipertahankan oleh Joe Biden.

Dalam kerangka mendukung Taiwan, pemerintahan Joe Biden juga secara diam-diam mengirim beberapa pasukan militernya ke Taiwan untuk berlatih bersama, yang mencakup personel Angkatan Laut dan Pasukan Operasi Khusus AS. Kurang lebih 26 personel AS dan pasukan pendukung berlatih bersama dengan pasukan darat Taiwan, sementara Angkatan Laut berlatih dalam kapal latihan kecil.

Hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa hubungan AS dan Taiwan telah berjalan dengan baik. Sekali lagi, dukungan AS terhadap Taiwan tersebut tidak terlepas dari masih diberlakukannya kebijakan *Taiwan Relations Act* oleh AS, yang di dalamnya mencakup hubungan pertahanan. Lebih jauh lagi, bahkan presiden AS siap untuk datang ke Taiwan apabila pulau tersebut diserang sewaktu-waktu oleh China.

Sikap AS yang tidak berubah dan cenderung mendukung Taiwan menimbulkan reaksi negatif dari China. Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan bahwa misi penyatuan kembali Taiwan dengan China akan dilakukan secara damai. Zhang Jun juga menyatakan bahwa China bukan negara pembuat onar, yang seolah-olah menyinggung pihak Barat tentang pengiriman pasukan militer ke Timur Tengah yang disponsori oleh AS dalam beberapa tahun terakhir (sindonews.com., 5 Oktober 2021). Pernyataan Zhang Jun didukung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, yang menegaskan bahwa kedaulatan China atas Taiwan adalah suatu hal yang tidak bisa dikompromikan. Urusan Taiwan adalah urusan China, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pihak asing, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, sekalipun itu dari AS bersama sekutu-sekutunya (Republika, 23 Oktober 2021).

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan dalam menyikapi persoalan yang terjadi di kawasan, dan hal tersebut bisa saja dipahami dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing

negara. AS, sebagai rival China dan juga negara yang berkepentingan di Asia-Pasifik, melihat kasus Taiwan tidak berdiri sendiri, tidak semata-mata sebagai persoalan internal China, tetapi juga harus dilihat dalam konteks kepentingan AS di kawasan, antara lain menyangkut kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif AS, untuk mengamankan kepentingan AS, mau tidak mau AS harus terlibat dalam persoalan Taiwan dengan China. Sebaliknya, China tetap berupaya tidak menggeser persoalan Taiwan menjadi isu eksternal, dan kembali menegaskan bahwa persoalan Taiwan adalah urusan dalam negeri China.

Penutup

Konflik China-Taiwan bisa saja dilihat sebagai persoalan internal bagi China. Namun, kehadiran Taiwan sebagai entitas yang cukup penting di kawasan telah mengundang AS, yang juga memiliki kepentingan dengan Taiwan dan juga kawasan, untuk menaruh perhatian pada persoalan yang terjadi di Taiwan, termasuk dalam hubungan China-Taiwan. Kepentingan AS adalah menjaga konflik China-Taiwan tidak menimbulkan persoalan bagi kelangsungan kepentingan AS di kawasan Asia-Pasifik. Sebaliknya, bagi China, persoalan Taiwan adalah urusan internal yang tidak bisa dikompromikan, dan menjadi urusan China untuk menanganinya. Bagi negara-negara di Kawasan, yang terpenting adalah situasi yang memanas dalam hubungan China-Taiwan tidak berkembang ke arah konflik terbuka, karena dampaknya bisa mengancam keamanan kawasan.

Referensi

- “AS Akan Bela Taiwan Melawan Tiongkok”, *Media Indonesia*, 23 Oktober 2021, hal. 23.
- “ASEAN Perlu Waspada Konflik Taiwan-China”, *Kompas*, 18 Oktober 2021, hal. 4.
- “China Warning AS Soal Taiwan: Perang Dapat Dipicu Kapan Saja!”, 5 Oktober 2021, <https://international.sindonews.com/read/559420/40/china-warning-as-soal-taiwan-perang-dapat-dipicu-kapan-saja>, diakses 18 Oktober 2021.
- “Indo-Pasifik Jadi Magnet”, *Kompas*, 15 Oktober 2021, hal. 4.
- “Isu Taiwan Memercik di Antara AS dan Cina”, *Republika*, 23 Oktober 2021, hal. 7.
- “Mengapa China Tidak Menyerang Taiwan?”, 20 September 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/20/150000779/mengapa-china-tidak-meny Serang-taiwan-?>, diakses 18 Oktober 2021.
- “Rekor Lagi, China Terbangkan 56 Pesawat Militer ke Langit Taiwan”, 5 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/05/064620270/rekor-lagi-china-terbangkan-56-pesawat-militer-ke-langit-taiwan>, diakses 8 Oktober 2021.
- “Sejarah Konflik China vs Taiwan, Saling Klaim Kedaulatan”, 6 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211006164334-113-704245/sejarah-konflik-china-vs-taiwan-saling-klaim-kedaulatan>, diakses tanggal 18 oktober 2021.

"Taiwan Tak Mau Memulai Perang dengan Bertahan", 14 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/14/111514870/taiwan-tak-mau-memulai-perang-dengan-china-tetapi-siap-bertahan?>, diakses 18 Oktober 2021.

"Taiwan Won't Start a War with China, Defence Minister Says", *the Jakarta Post*, 15 Oktober 2021, hal.8.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.